



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348, Faksimile (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 292 /BUA.1.01/OT1/VIII/2024 16 Agustus 2024  
Lampiran : Satu rangkap  
Hal : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem  
Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) 2024

- Yth. 1. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;  
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

Menindaklanjuti surat Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) tingkat kesekretariatan lembaga negara tahun 2024 nomor B/452/M.PP.00.04/2024 pada tanggal 10 Juli 2024. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, maka perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masih ditemukan sebanyak 193 satuan kerja yang belum memiliki akun SIPPN. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bagi satuan kerja yang belum memiliki akun SIPPN sebagaimana terlampir, untuk mengisi pada link: [bit.ly/akunsippn2024](https://bit.ly/akunsippn2024) paling lambat tanggal **22 Agustus 2024**.
2. Satuan kerja yang sudah memiliki akun wajib untuk:
  - a. Melakukan login pada <https://sippn.menpan.go.id>
  - b. Melengkapi informasi umum satuan kerja, website dan logo satuan kerja pada aplikasi SIPPN;
  - c. Mengisi data pelaksana, diprioritaskan nama-nama pimpinan yang bertanggung jawab dalam layanan tersebut;
  - d. Mempublikasikan standar pelayanan yang dimiliki, penyusunan standar pelayanan dapat merujuk pada PermenPANRB No.15 tahun 2014 dan jenis layanan yang diprioritaskan untuk diinputkan adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - e. Mengunggah Maklumat Pelayanan pada menu Profil Satuan Kerja;
  - f. Mengunggah SK Standar Pelayanan pada menu Profil Satuan Kerja;
  - g. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait halaman SIPPN milik satuan kerja dan dapat juga menyematkan link SIPPN pada website satuan kerja;

3. Satuan kerja dapat mengunduh tata cara penggunaan aplikasi SIPPN, pada link [bit.ly/monevsippn2024](https://bit.ly/monevsippn2024)

Mengingat pentingnya pemenuhan data tersebut sebagai indikator pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB). Oleh karena itu, disampaikan kepada seluruh satuan kerja untuk memenuhi poin 2 tersebut paling lambat tanggal **31 Agustus 2024**.

Informasi lebih lanjut mengenai pemantauan SIPPN Tahun 2024 dapat menghubungi whatsapp Sdr. Purwanto (0878-7579-4676) dan Sdri. Osmadera (0899-4227-207) pada hari kerja, Senin-Jumat (08.00-16.30).

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi



Tembusan:

1. Sekretaris Jendral Badan Peradilan Umum;
2. Sekretaris Jendral Badan Peradilan Agama;
3. Sekretaris Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

LAMPIRAN  
 Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  
 Nomor : 292/BUA.1.01/OT1/VIII/2024  
 Tanggal: 16 Agustus 2024

**DAFTAR SATUAN KERJA TINGKAT BANDING DAN PERTAMA YANG BELUM  
 MEMILIKI AKUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)**

PERADILAN UMUM

No.	SATUAN KERJA	TINGKAT BANDING
1	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	PENGADILAN TINGGI AMBON
2	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	
3	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	
4	PENGADILAN NEGERI TUAL	
5	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
6	PENGADILAN NEGERI SINGKIL	
7	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	
8	PENGADILAN NEGERI BANJAR	PENGADILAN TINGGI BANDUNG
9	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	
10	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	
11	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	
12	PENGADILAN NEGERI CIREBON	
13	PENGADILAN NEGERI DEPOK	
14	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG	
15	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	
16	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	
17	PENGADILAN NEGERI SUMBER	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
18	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	
19	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	
20	PENGADILAN NEGERI RANTAU	PENGADILAN TINGGI BANTEN
21	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	
22	PENGADILAN NEGERI SERANG	PENGADILAN TINGGI BENGKULU
23	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	
24	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	
25	PENGADILAN NEGERI MANNA	PENGADILAN TINGGI DENPASAR
26	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	
27	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG/SEMARAPURA	
28	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	PENGADILAN TINGGI GORONTALO
29	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	
30	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	PENGADILAN TINGGI JAKARTA
31	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	
32	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	
33	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	

No.	SATUAN KERJA	TINGKAT BANDING
34	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	
35	PENGADILAN NEGERI JAMBI	
36	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	PENGADILAN TINGGI JAMBI
37	PENGADILAN NEGERI SENGETI	
38	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	
39	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
40	PENGADILAN NEGERI SERUI	
41	PENGADILAN NEGERI WAMENA	
42	PENGADILAN NEGERI MALINAU	
43	PENGADILAN NEGERI RAHA	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA
44	PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN TINGGI KENDARI
		PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
45	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	PENGADILAN TINGGI KUPANG
46	PENGADILAN NEGERI KALABAH	
47	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	
48	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	
49	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	
50	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	
51	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	
52	PENGADILAN NEGERI RUTENG	
53	PENGADILAN NEGERI SO'E	
54	PENGADILAN NEGERI BOBONG	
55	PENGADILAN NEGERI SANANA	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
56	PENGADILAN NEGERI SOASIU	
57	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	
58	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	PENGADILAN TINGGI MANADO
59	PENGADILAN TINGGI MANADO	
60	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	PENGADILAN TINGGI MATARAM
61	PENGADILAN NEGERI SELONG	
62	PENGADILAN TINGGI MATARAM	
63	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	PENGADILAN TINGGI MEDAN
64	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	
65	PENGADILAN NEGERI MEDAN	
66	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	
67	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	
68	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAN	
69	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	
70	PENGADILAN NEGERI SIBUHAN	
71	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	
72	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	
73	PENGADILAN NEGERI STABAT	
74	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	
75	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	
76	PENGADILAN TINGGI MEDAN	

No.	SATUAN KERJA	TINGKAT BANDING
77	PENGADILAN NEGERI MUARO	PENGADILAN TINGGI PADANG
78	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	
79	PENGADILAN NEGERI SOLOK	
80	PENGADILAN TINGGI PADANG	
81	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
82	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	
83	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	
84	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	
85	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
86	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	
87	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	
88	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	
89	PENGADILAN TINGGI PALU	PENGADILAN TINGGI PALU
90	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT
91	PENGADILAN NEGERI SORONG	
92	PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	
93	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
94	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	
95	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	
96	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	
97	PENGADILAN TINGGI PEKANBARU	
98	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	
99	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
100	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	
101	PENGADILAN NEGERI NGABANG	
102	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	
103	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	
104	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	
105	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	
106	PENGADILAN NEGERI SINTANG	
107	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	
108	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	
109	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
110	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	
111	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	
112	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	
113	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	PENGADILAN TINGGI SEMARANG
114	PENGADILAN NEGERI BREBES	
115	PENGADILAN NEGERI JEPARA	
116	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	
117	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	
118	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	
119	PENGADILAN NEGERI KUDUS	
120	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	

No.	SATUAN KERJA	TINGKAT BANDING
121	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	
122	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	
123	PENGADILAN NEGERI REMBANG	
124	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	
125	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	
126	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	
127	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	
128	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	
129	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	
130	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	
131	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT	PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT
132	PENGADILAN NEGERI GRESIK	PENGADILAN TINGGI SURABAYA
133	PENGADILAN NEGERI JEMBER	
134	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	
135	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	
136	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	
137	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	
138	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	
139	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	
140	PENGADILAN NEGERI MADIUN	
141	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	
142	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	
143	PENGADILAN NEGERI NGAWI	
144	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	
145	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	
146	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	
147	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	
148	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
149	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	
150	PENGADILAN NEGERI KALIANDA	
151	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	
152	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	
153	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	
154	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	
155	PENGADILAN NEGERI METRO	
156	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	
157	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	
158	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG
159	PENGADILAN NEGERI MAKALE	
160	PENGADILAN NEGERI MALILI	
161	PENGADILAN NEGERI MAROS	
162	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	
163	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	

No.	SATUAN KERJA	TINGKAT BANDING	
164	PENGADILAN NEGERI SENKANG		
165	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG		
166	PENGADILAN NEGERI SINJAI		
167	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA		
168	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG/MAKASSAR		
169	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE		
170	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG		
171	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG/MAKASSAR		
172	PENGADILAN NEGERI SLEMAN		PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
173	PENGADILAN NEGERI WATES		
174	PENGADILAN NEGERI WONOSARI		
175	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA		
176	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA		

#### PERADILAN AGAMA

No.	SATUAN KERJA	TINGKAT BANDING
1	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
2	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	
3	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	
4	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	
5	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	
6	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	
7	PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI	PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI
8	PENGADILAN AGAMA NEGARA	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
9	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA	PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA
10	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
11	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	
12	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU	PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU
13	PENGADILAN AGAMA MEDAN	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
14	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT	PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
15	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
16	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT	PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

#### PERADILAN MILITER

No.	SATUAN KERJA	TINGKAT BANDING
1	PENGADILAN MILITER II - 10 DI SEMARANG	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA